



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (1), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja Hukum Tua, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu memberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahatsa Tenggara Tahun 2015 Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 613).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020.**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya di singkat Dinas PMD adalah dinas teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau Hukum Tua yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan, menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
12. Pelaksanan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
13. Rapat adalah pertemuan yang dilaksanakan guna membahas dan evaluasi setiap program kegiatan yang ada di Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
14. Rapat wajib adalah pertemuan wajib setiap pagi sebagai pengganti Apel Pagi.
15. Penilaian kinerja adalah penilaian atas respon setiap desa atas permintaan data dan laporan.

BAB II
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 57.039.000.000 (Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dimanfaatkan untuk pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Hukum Tua dan Perangkat Desa serta pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Hukum Tua dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- (3) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah sbb :

Uraian	Penghasilan Tetap (Rp)	Tunjangan (Rp)	Total (Rp)
Hukum Tua	2.500.000	1.500.000	4.000.000
Plt/Penjabat Hukum Tua ASN	-	4.000.000	4.000.000
Perangkat Desa	1.250.000	750.000	2.000.000
Ketua BPD	-	3.000.000	3.000.000
Anggota BPD	-	2.000.000	2.000.000

- (4) Penghasilan Tetap dibayarkan setiap bulan sesuai dengan besaran yang ditetapkan;
- (5) Khusus Pelaksana Tugas/Penjabat Hukum Tua dari ASN tidak dibayarkan penghasilan tetap dan hanya menerima tunjangan;
- (6) Tunjangan Hukum Tua ASN dibayarkan apabila yang bersangkutan tidak menerima tunjangan kinerja daerah;
- (7) Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan berdasarkan penilaian disiplin kerja dan penilaian kinerja;
- (8) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Hukum Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (5) dibayarkan berdasarkan Pengangkatan jabatan Hukum Tua oleh Bupati atau Camat;

(9) Pembayaran Tunjangan kepada Hukum Tua, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan pengurangan sesuai penilaian disiplin kerja masing-masing, Hal-hal yang dapat mengurangi tunjangan :

a. Tunjangan Hukum Tua :

1. Tidak menghadiri rapat/kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan maupun Kabupaten;
2. Ijin keluar daerah.

b. Tunjangan Perangkat Desa :

1. Tidak mengikuti rapat wajib baik dalam Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
2. Tidak kerja bakti atau kegiatan-kegiatan resmi desa lainnya;
3. Tidak hadir dalam rapat desa, kecamatan dan kabupaten;
4. Penilaian Kinerja;
5. Ijin keluar daerah.

c. Tunjangan BPD :

1. Tidak hadir dalam rapat bersama BPD, rapat dengan Pemerintah Desa dan musyawarah-musyawarah Desa;
2. Tidak kerja bakti atau kegiatan-kegiatan resmi desa lainnya;
3. Tidak hadir dalam rapat di Kecamatan dan Kabupaten;
4. Ijin keluar daerah.

(10) Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b angka 1 dan 3 wajib disertai dengan daftar hadir dan dokumentasi timestamp.

(11) Pengurangan tunjangan sesuai dengan ayat (9) diatas diatur sebagai berikut :

- a. Tidak mengikuti rapat wajib di Desa ataupun di Kecamatan 5 %;
- b. Tidak mengikuti rapat desa, kecamatan maupun di kabupaten 3%;
- c. Tidak mengikuti kerja bakti 7 %;
- d. Sakit yang dibuktikan dengan surat dokter dipotong 3%;
- e. Ijin (membuat ijin tertulis) dipotong 5%;
- f. Tanpa berita dipotong 7 %.

- (12) Selain Pemotongan berdasarkan disiplin kerja, pemotongan pembayaran tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa juga dilakukan berdasarkan kinerja Desa atas pemasukan data/laporan sesuai waktu yang ditentukan.
- (13) Pemotongan berdasarkan keterlambatan pemasukan data/laporan sesuai ayat (12) diatas, diatur sebagai berikut:
- (a) Pemotongan atas keterlambatan memasukkan permintaan data/laporan dapat dilakukan oleh Camat maupun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - (b) Besaran pemotongan adalah 20% dari tunjangan untuk keterlambatan 1 (satu) hari, 30% untuk keterlambatan 2 (dua) hari, 40% untuk keterlambatan 3 (tiga) hari dan 50% untuk keterlambatan lebih dari 3 (tiga) hari.
- (14) Untuk pembayaran tunjangan sebagaimana ayat (7) di atas, diatur sebagai berikut :
- a. Dinas PMD merekap data disiplin kerja berdasarkan fingerprint desa;
 - b. Rekapan fingerprint di cetak oleh Dinas PMD;
 - c. Hukum Tua selaku atasan langsung perangkat desa wajib menyampaikan laporan kinerja perangkat desa bulanan kepada Dinas PMD untuk dijadikan tambahan perhitungan dalam menetapkan total tunjangan yang akan diterima masing-masing perangkat desa;
 - d. Penilaian kinerja Hukum Tua ditandatangani Camat dan Perangkat Desa oleh Hukum Tua;
 - e. Penilaian Kinerja BPD mengacu dalam peraturan tentang BPD;
 - f. Desa mengajukan permintaan pembayaran tunjangan berdasarkan daftar yang dikeluarkan oleh Dinas PMD.
- (15) Permohonan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan ditandatangani oleh Hukum Tua.
- (16) Apabila terdapat kewajiban-kewajiban desa yang belum diselesaikan, maka Dinas PMD berhak untuk menunda proses permintaan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD.
- (17) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan

Desa adalah sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SASARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Sasaran Alokasi Dana Desa adalah wilayah administrasi Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari 135 (seratus tiga puluh lima) Desa yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam rangka pemberdayaan Desa harus dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang sebelumnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan koordinator Sekretaris Desa.
- (3) Kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDes.

Pasal 5

- (1) Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes).
- (2) Pencairan dana dalam rekening Desa ditandatangani oleh Hukum Tua dan Bendahara Desa.
- (3) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dibayarkan secara non tunai ke rekening masing-masing Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD.

BAB V

PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBdes.

- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif dan transparan.
- (4) Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip Hemat, Terarah dan Terkendali.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2019 dan Nomor 40 tentang perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.











**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	KET
1	KASI		
2	KASID PEMDES		
3	SEKRETARIS DPMD		
4	KARAG HUKUM		
5	KEPALA DINAS PMD		
6	INSPEKTUR		
7	KABAN BPPD		
8	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
9	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA		
10	WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA		
11	BUPATI MINAHASA TENGGARA	Dh. Mohon Untuk Ditandatangani	



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 6 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**



ROBY NGONGOLOY

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 2020

Tentang : Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020

DAFTAR PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN HUKUM TUA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD TAHUN 2020

No	Kecamatan/Desa	Jumlah Perangkat	Hukum Tua	Kepala Urusan & Seksi	Kepala Jaga	Ketua BPD	Anggota BPD	PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN			TUNJANGAN		TOTAL
								Hukum Tua	Kepala Jaga	Kepala Urusan & Seksi	Ketua BPD	Anggota BPD	
I	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	16	17	18
1	Touluaan												
	1 Toundanouw	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	2 Ranoketang Atas	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	3 Lobu Satu	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	4 Lobu Dua	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	5 Lobu Kota	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	6 Lobu Atas	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	7 Lobu	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	8 Toundanouw Atas	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	9 Toundanouw Satu	10	1	6	3	1	4	48,000,000	144,000,000	72,000,000	36,000,000	96,000,000	396,000,000
	10 Ranoketang Atas Satu	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	Jumlah	109	10	60	39	10	40	480,000,000	1,440,000,000	936,000,000	360,000,000	960,000,000	4,176,000,000
2	Touluaan Selatan												
	1 Kalait Satu	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	2 Kalait Dua	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	3 Kalait Tiga	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	4 Kalait	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	5 Rancako	10	1	6	3	1	4	48,000,000	144,000,000	72,000,000	36,000,000	96,000,000	396,000,000
	6 Tambelang	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	7 Suhuyon	9	1	6	2	1	4	48,000,000	144,000,000	48,000,000	36,000,000	96,000,000	372,000,000
	8 Lowatag	9	1	6	2	1	4	48,000,000	144,000,000	48,000,000	36,000,000	96,000,000	372,000,000
	9 Bunag	9	1	6	2	1	4	48,000,000	144,000,000	48,000,000	36,000,000	96,000,000	372,000,000
	10 Bunga	9	1	6	2	1	4	48,000,000	144,000,000	48,000,000	36,000,000	96,000,000	372,000,000
	Jumlah	101	10	60	31	10	40	480,000,000	1,440,000,000	744,000,000	360,000,000	960,000,000	3,984,000,000

No	Kecamatan/Desa	Jumlah Perangkit	Hukum Tua	Kepala Urusan & Seksi	Kepala Jaga	PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN			TUNJANGAN			TOTAL	
						Hukum Tua	Kepala Jaga	Kepala Urusan & Seksi	Ketua BPD	Anggota BPD	Anggota BPD		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	16	17	18
3	Silihan Raya												
	1 Silihan Barat	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	2 Silihan Utara	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	3 Silihan Tengah	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	4 Silihan Utara	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	5 Silihan	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	6 Silihan Satu	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	7 Silihan Timur	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	8 Silihan Selatan	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	9 Silihan Kota	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	10 Silihan Dua	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	Jumlah	110	10	60	40	10	40	480,000,000	1,440,000,000	960,000,000	360,000,000	960,000,000	4,200,000,000
4	Tombatu												
	1 Tombatu	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	2 Tombatu Satu	14	1	6	7	1	4	48,000,000	144,000,000	168,000,000	36,000,000	96,000,000	492,000,000
	3 Betelen	12	1	6	5	1	4	48,000,000	144,000,000	120,000,000	36,000,000	96,000,000	444,000,000
	4 Betelen Satu	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	5 Kall	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	6 Kall Okh	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	7 Tombatu Tiga Timur	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	8 Tombatu Tiga Selatan	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	9 Tonsawang Satu	11	1	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	96,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	10 Tonsawang	12	1	6	5	1	4	48,000,000	144,000,000	120,000,000	36,000,000	96,000,000	444,000,000
	11 Pias	9	1	6	2	1	4	48,000,000	144,000,000	48,000,000	36,000,000	96,000,000	372,000,000
	Jumlah	124	11	66	47	11	44	528,000,000	1,584,000,000	1,128,000,000	396,000,000	1,056,000,000	4,692,000,000

No	Kecamatan/Desa	Jumlah Perangkat	Hukum Tua	Kepala Urusan & Seksi	Kepala Jaga	Ketua BPD	Anggota BPD	PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN			TUNJANGAN		TOTAL
								Hukum Tua	Kepala Jaga	Kepala Urusan & Seksi	Ketua BPD	Anggota BPD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	16	17	18
5	Tombatu Timur												
	1 Molompar	11	1	6	4	1	4	48.000,000	144.000,000	96.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	2 Molompar Satu	11	1	6	4	1	4	48.000,000	144.000,000	96.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	3 Molompar Atas	11	1	6	4	1	4	48.000,000	144.000,000	96.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	4 Molompar Dua	11	1	6	4	1	4	48.000,000	144.000,000	96.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	5 Molompar Dua Utara	12	1	6	5	1	4	48.000,000	144.000,000	120.000,000	36.000,000	96.000,000	444.000,000
	6 Molompar Dua Selatan	11	1	6	4	1	4	48.000,000	144.000,000	96.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	7 Mundung	12	1	6	5	1	4	48.000,000	144.000,000	120.000,000	36.000,000	96.000,000	444.000,000
	8 Mundung Satu	12	1	6	5	1	4	48.000,000	144.000,000	120.000,000	36.000,000	96.000,000	444.000,000
	9 Esabdom	11	1	6	4	1	4	48.000,000	144.000,000	96.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	10 Esandom Satu	11	1	6	4	1	4	48.000,000	144.000,000	96.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	11 Esandom Dua	11	1	6	4	1	4	48.000,000	144.000,000	96.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	Jumlah	124	11	66	47	11	44	528.000,000	1.584.000,000	1.128.000,000	396.000,000	1.056.000,000	4.692.000,000
6	Tombatu Utara												
	1 Tombatu Dua Utara	11	1	6	4	1	4	48.000,000	96.000,000	144.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	2 Tombatu Dua Tengah	11	1	6	4	1	4	48.000,000	96.000,000	144.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	3 Tombatu Dua Barat	11	1	6	4	1	4	48.000,000	96.000,000	144.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	4 Tombatu Dua	12	1	6	5	1	4	48.000,000	120.000,000	144.000,000	36.000,000	96.000,000	444.000,000
	5 Tombatu Dua	11	1	6	4	1	4	48.000,000	96.000,000	144.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	6 Tombatu Tiga Tengah	11	1	6	4	1	4	48.000,000	96.000,000	144.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	7 Kuvana Satu	13	1	6	6	1	4	48.000,000	144.000,000	144.000,000	36.000,000	96.000,000	458.000,000
	8 Wiorangian	12	1	6	5	1	4	48.000,000	120.000,000	144.000,000	36.000,000	96.000,000	444.000,000
	9 Kuvana	11	1	6	4	1	4	48.000,000	96.000,000	144.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	10 Wiorangian Satu	11	1	6	4	1	4	48.000,000	96.000,000	144.000,000	36.000,000	96.000,000	420.000,000
	Jumlah	114	10	60	44	10	40	480.000,000	1.056.000,000	1.440.000,000	360.000,000	960.000,000	4.296.000,000

No	Kecamatan/Desa	PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN							TUNJANGAN			TOTAL		
		Jumlah Perangkat	Hukum Tua	Kepala Urusan & Seksi	Kepala Jaga	Ketua BPD	Kepala Urusan & Seksi	Ketua BPD	Anggota BPD					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18
7	Pasan													
	1 Tolombukan	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	2 Tolombukan Satu	12	1	6	5	4	1	4	48,000,000	120,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	444,000,000
	3 Tolombukan Barat	10	1	6	3	4	1	4	48,000,000	72,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	396,000,000
	4 Liwutung	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	5 Liwutung Satu	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	6 Liwutung Dua	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	7 Maulit	12	1	6	5	4	1	4	48,000,000	120,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	8 Toruntu	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	444,000,000
	9 Toruntu Barat	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	10 Ponaki	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	11 Toruntu Timur	13	1	6	6	4	1	4	48,000,000	144,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	Jumlah	124	11	66	47	47	11	44	528,000,000	1,128,000,000	1,584,000,000	396,000,000	1,086,000,000	4,692,000,000
8	Rataban													
	1 Rasi	13	1	6	6	6	1	4	48,000,000	144,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	468,000,000
	2 Rasi Satu	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	Jumlah	24	2	12	10	10	2	8	96,000,000	240,000,000	288,000,000	72,000,000	192,000,000	888,000,000
9	Rataban Timur													
	1 Wioi	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	2 Wioi Satu	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	3 Wioi Dua	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	4 Wioi Tiga	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	5 Wioi Timur	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	6 Pagan	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	7 Pagan Satu	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	8 Pagan Dua	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	9 Wongkai	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	10 Wongkai Satu	11	1	6	4	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	Jumlah	110	10	60	40	40	10	40	480,000,000	960,000,000	1,440,000,000	360,000,000	960,000,000	4,200,000,000

No	Kecamatan/Desa	Jumlah Perangkat	Hukum Tua	Kepala Urusan & Seksi	Kepala Jaga	FENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN			TUNJANGAN		TOTAL		
						Hukum Tua	Kepala Urusan & Seksi	Ketua BPD	Ketua BPD	Anggota BPD			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	16	17	18
10 Belang													
1	Watuliney Tengah	12	1	6	5	1	4	48,000,000	120,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	444,000,000
2	Watuliney Indah	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
3	Molompar Utara	12	1	6	5	1	4	48,000,000	120,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	444,000,000
4	Molompar Timur	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
5	Tababo	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
6	Tababo Selatan	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
7	Buku Tengah	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
8	Buku Utara	12	1	6	5	1	4	48,000,000	120,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	444,000,000
9	Buku Selatan	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
10	Buku Tenggara	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
11	Belang	13	1	6	6	1	4	48,000,000	144,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	468,000,000
12	Borgo	12	1	6	5	1	4	48,000,000	120,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	444,000,000
13	Beringin	9	1	6	2	1	4	48,000,000	48,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	372,000,000
14	Borgo Satu	12	1	6	5	1	4	48,000,000	120,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	444,000,000
15	Manghit	10	1	6	5	1	4	48,000,000	120,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	444,000,000
16	Ponosakan Indah	10	1	6	3	1	4	48,000,000	72,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	396,000,000
17	Jumlah	225	20	120	85	20	80	960,000,000	2,040,000,000	2,880,000,000	720,000,000	1,920,000,000	8,520,000,000
11 Pusomaen													
1	Minanga	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
2	Minanga Timur	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
3	Minanga Satu	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
4	Minanga Dua	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
5	Minanga Tiga	10	1	6	3	1	4	48,000,000	72,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	396,000,000
6	Makain Selatan	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
7	Makalu	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
8	Tatengesan	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
9	Tatengesan Satu	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
10	Tumbak Madani	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
11	Tumbak	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
12	Bentenan	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
13	Bentenan Satu	10	1	6	3	1	4	48,000,000	72,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	396,000,000
14	Bentenan Indah	10	1	6	3	1	4	48,000,000	72,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	396,000,000
15	Wiau	10	1	6	3	1	4	48,000,000	72,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	396,000,000
16	Jumlah	161	15	90	56	15	60	720,000,000	1,344,000,000	2,160,000,000	540,000,000	1,440,000,000	6,204,000,000

No	Kecamatan/Desa	Jumlah Perangkat	Hukum Tua	Kepala Urusan & Seksi	Kepala Jaga	PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN			TUNJANGAN			TOTAL	
						Hukum Tua	Kepala Jaga	Kepala Urusan & Seksi	Ketua BPD	Anggota BPD	Anggota BPD		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	16	17	18
12	Ratatotok												
	1 Basaan	13	1	6	6	1	4	48,000,000	144,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	468,000,000
	2 Basaan Satu	12	1	6	5	1	4	48,000,000	120,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	444,000,000
	3 Basaan Dua	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	4 Ratatotok	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	5 Ratatotok Satu	12	1	6	5	1	4	48,000,000	120,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	444,000,000
	6 Ratatotok Dua	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	7 Ratatotok Utara	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	8 Ratatotok Selatan	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	9 Ratatotok Tenggara	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	10 Ratatotok Timur	12	1	6	5	1	4	48,000,000	120,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	444,000,000
	11 Ratatotok Tengah	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	12 Ratatotok Muara	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	13 Moreah	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	14 Moreah Satu	11	1	6	4	1	4	48,000,000	96,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	420,000,000
	15 Soyowan	13	1	6	6	1	4	48,000,000	144,000,000	144,000,000	36,000,000	96,000,000	468,000,000
	Jumlah	172	15	90	67	15	60	720,000,000	1,608,000,000	2,160,000,000	540,000,000	1,440,000,000	6,468,000,000
	TOTAL	1498	135	810	553	135	540	6,480,000,000	15,864,000,000	16,848,000,000	4,860,000,000	12,960,000,000	57,039,000,000

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	KET
1	KASI		
2	KAPID PEDEDES	<i>A. G.</i>	
3	SEKRETARIS DPRD	<i>[Signature]</i>	
4	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	
5	KEPALA DINAS PND	<i>[Signature]</i>	
7	INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>	
8	KABAN BKPD	<i>[Signature]</i>	
9	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEKOR	<i>[Signature]</i>	
10	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	<i>[Signature]</i>	
11	WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA	<i>[Signature]</i>	
12	BUPATI MINAHASA TENGGARA	Dr. Mohos Untak Ditasdangani	

BUPATI MINAHASA TENGGARA

JAMES SUMENDAP